

KONDISI KONFLIK DI INDO-PASIFIK: MEMAHAMI AKAR MASALAH DARI AUKUS HINGGA MANUEVER CHINA

Jerry Indrawan

UPN Veteran Jakarta
jerry.indrawan@upnvj.ac.id

Abstract

A defense cooperation alliance called AUKUS emerged in the Indo-Pacific in the midst of China's rise as a candidate for world hegemony. AUKUS seems to oppose China's hegemony in the region because the interests of the countries that are members of it will surely be disturbed by the rise of the power of the Bamboo Curtain country. As one of the countries in the Indo-Pacific, Indonesia certainly feels the impact of the rivalry of hegemonistic countries that behaved like their predecessors in the Cold War era. An era that is thick with the nuances of the threat of war, according to the Regional Security Complex theory. This theory will be the basis for the author's analysis to discuss AUKUS, especially from the point of view of potential threats between countries in the Indo-Pacific region as a result of the presence of AUKUS. The results of this study indicate that AUKUS was formed by Australia, United Kingdom, and the United States as an anti-thesis to China's maneuvers in the Indo-Pacific. In addition, this research also produces several strategic policy proposals that Indonesia can do to counteract the impact of the presence of the new defense pact. This study uses a qualitative descriptive-analytical method, in which the data collection process is carried out through a literature study.

Keywords: AUKUS, Regional Security Complex, China's Anti-Thesis Maneuver, Indonesia's Strategic Policy

Abstrak

Aliansi kerjasama pertahanan bernama AUKUS muncul di Indo-Pasifik di tengah kebangkitan China sebagai calon negara hegemoni dunia. AUKUS seakan menentang hegemoni China di kawasan karena kepentingan negara-negara yang tergabung di dalamnya pasti akan terganggu dengan bangkitnya kekuatan negeri Tirai Bambu tersebut. Sebagai salah satu negara di Indo-Pasifik, Indonesia tentu merasakan dampak dari rivalitas negara-negara hegemonistik yang berkelakuan mirip pendahulunya pada era Perang Dingin dahulu. Sebuah era yang kental dengan nuansa ancaman perang, sesuai teori *Regional Security*

Complex. Teori ini akan menjadi landasan analisis penulis untuk membahas tentang AUKUS, khususnya dari sudut pandang potensi ancaman antara negara-negara di kawasan Indo-Pasifik sebagai akibat kehadiran AUKUS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa AUKUS dibentuk oleh Australia, Inggris, dan Amerika Serikat sebagai anti-tesis manuver China di Indo-Pasifik. Selain itu, penelitian ini juga menghasilkan beberapa usulan kebijakan strategis yang bisa dilakukan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif-analisis, di mana proses pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka.

Kata Kunci: AUKUS, Regional Security Complex, Anti-Tesis Manuver China, Kebijakan Strategis Indonesia

Article History: *Received 22 February 2022, Revised: 05 April 2022, Accepted: 30 April 2022, Available online 01 June 2022*

Pendahuluan

Sejak pembentukan aliansi *Australia-United Kingdom-United States* bulan September 2021 lalu atau disingkat AUKUS, situasi keamanan regional di Asia Pasifik mengalami peningkatan tensi militer. Negara-negara kawasan Indo-Pasifik, termasuk Indonesia, gempar ketika tiga negara ini membentuk AUKUS. Kehadiran AUKUS membuat Australia dapat mengembangkan kekuatan nuklirnya, utamanya melalui pembangunan kapal selam bersenjata nuklir.

Menurut penelitian Nindya dan Abiyya, pakta pertahanan tiga negara serumpun ini mampu memberikan dampak kejut yang signifikan terhadap kondisi keamanan regional, jika tidak secara berdampak secara global juga. Salah satu penyebab berdirinya AUKUS adalah meningkatnya hegemoni China di Indo-Pasifik, berkaitan dengan klaim mereka terhadap Laut China Selatan (LCS). AUKUS didirikan untuk menangkal atau sebagai efek gentar (*deterrence*) terhadap manuver-manuver negeri Tirai Bambu itu. Secara implisit, tendensi itu terlihat saat pengumuman aliansi AUKUS oleh tiga pemimpin negaranya (Nindya & Abiyya, 2022).

Menurut penulis, pakta transfer teknologi kapal selam bersenjata nuklir ini ditenggarai untuk melawan manuver China di Indo-Pasifik, sesuai dengan hasil penelitian Nindya

dan Abiyya di atas. Akibatnya, tensi politik di kawasan Indo-Pasifik akan semakin memanas usai kesepakatan trilateral tersebut yang menyebutkan bahwa delapan kapal selam nuklir akan segera dikembangkan untuk menambah kekuatan tempur laut Australia. Langkah ini semakin mengindikasikan bahwa negeri Kangguru ini memicu perlombaan senjata nuklir di kawasan tersebut.

Pada akhir tahun 2021, segera setelah AUKUS dibentuk, Perdana Menteri Australia kala itu, Scott Morrison, bersama dengan rekan-rekannya di Inggris dan AS, mengumumkan kesepakatan untuk delapan kapal selam bertenaga nuklir. Desain dan biaya yang tepat dari kapal selam Australia belum diungkapkan, tetapi dilaporkan akan menyerupai kapal selam nuklir kelas Virginia milik Amerika Serikat (AS) masing-masing berharga sekitar 4,5 miliar dollar AS (Rp 64 triliun) dan kelas Astute Inggris masing-masing 2,6 miliar dollar AS (Rp 37 triliun). Armada kapal selam ini dipastikan lebih cepat dan lebih sulit dideteksi daripada armada bertenaga konvensional. Kapal selam nuklir dapat berada di bawah laut lebih lama daripada kapal selam biasa, sehingga dapat menerapkan taktik siluman jika bertempur dengan musuh (Puspaningrum, 2021).

Mendengar kabar ini, Beijing tentu meradang. Kehadiran armada kapal selam nuklir di Indo-Pasifik membuat wilayah-wilayah sengketa di kawasan, seperti di LCS, Laut China Timur (LCT), dan juga Selat Taiwan yang baru-baru ini sedang ramai karena pergolakan dengan Taiwan, membuat China dominasi mereka di kawasan sangat terancam. Sekalipun kapal selam yang akan dimiliki Australia nanti tidak terdapat hulu ledak nuklir di dalamnya, namun apapun yang mereka lakukan pasti akan berdampak negatif, bahkan bisa sampai pada perang nuklir. Rivalitas nuklir dalam cakupan geopolitik kawasan ini adalah sebuah sikap lepas tanggung jawab dari negar-negara AUKUS, sehingga perlu dipertanyakan komitmen Australia, khususnya terkait Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) (Muhaimin, 2021).

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif-analisis dengan pengumpulan data dilakukan secara studi pustaka, melalui buku, jurnal ilmiah, dan pemberitaan media massa daring. Metode penelitian kualitatif deskriptif juga bisa dilakukan untuk memberi deskripsi fenomena yang ada, baik alami maupun buatan manusia. Fenomena tersebut berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2006). Fenomena yang penulis teliti adalah kehadiran AUKUS di Indo-Pasifik dan dampaknya terhadap negara-negara di kawasan tersebut, khususnya Indonesia. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian untuk memecahkan masalah yang akan diteliti dengan melakukan penggambaran subjek dan objek yang akan diteliti tersebut. Subjek dan objek tersebut bisa dalam bentuk lembaga, komunitas, individu, dan lain-lain. Analisis yang dilakukan harus sesuai dengan kenyataan di lapangan, dalam arti faktual dan sesuai realita (Nawawi, 1997).

Tulisan ini akan menggunakan teori Kompleksitas Keamanan Regional atau lebih sering dikenal dengan *Regional Security Complex*. Teori yang dicetus oleh Barry Buzan dan Ole Weaver menekankan pada unsur regional saat memahami perkembangan dan dinamika negara-negara di dalam wilayah itu. Berada dalam satu kawasan tidak menjamin negara-negara memiliki hubungan yang baik antar-sesamanya. Walaupun, masing-masing memiliki ketergantungan, akan tetapi ketegangan antar-mereka tetap terjadi. Di sebuah kawasan dapat dipenuhi hal-hal, seperti aliansi, yang memunculkan adanya perimbangan kekuatan antar-negara atau lebih dikenal sebagai *balance of power* (Buzan & Weaver, 2003).

Menurut Buzan dan Waever, ada empat tingkat yang digunakan untuk memberikan analisa tentang keamanan di kawasan, yaitu keamanan domestik satu negara, interaksi antar-negara dalam satu kawasan, interaksi antar-negara dengan negara-negara di kawasan lain, dan hadirnya kekuatan global

yang merasa memiliki pengaruh di kawasan tersebut. *Regional Security Complex* memiliki dua variabel. Variabel internal memiliki beberapa indikator, pertama yaitu letak geografis yang dimana negara tersebut terdapat di satu kawasan walaupun tidak semua negara yang satu kawasan ada kesepakatan mengatur keamanan. Indikator lainnya adalah interaksi antar negara yang di mana melihat kedekatan negara-negara tersebut sehingga menimbulkan hubungan yang erat dan merasa merupakan satu kesatuan yaitu di satu kawasan. Indikator terakhir adalah kesamaan sistem, kesamaan sistem yang dimaksud adalah banyaknya kesamaan dalam sistem budaya, politik, ekonomi, dari kesamaan yang kompleks inilah yang menimbulkan rasa solidaritas bersama. Selanjutnya, variabel eksternal yang dapat diukur melalui dua indikator yaitu situasi internasional dan isu yang sedang berkembang. Situasi internasional yang dimana indikator ini untuk melihat kondisi yang terjadi di dunia sehingga memunculkan pertanyaan, apakah diperlukan pengaturan keamanan di suatu kawasan. Selanjutnya isu berkembang yang dimaksud adalah dari isu-isu tersebut dapat meningkatkan kerjasama keamanan di kawasan tersebut seperti isu terorisme (Buzan & Weaver, 2003).

Selain teori *Regional Security Complex*, penulis juga menggunakan teori regionalisme dari John Ravenhill dan Theodore Cohn. Menurut Ravenhill, regionalisme berakar dari kata *region* yang dimaknai sebagai sebuah entitas yang memiliki anggota dan definisi batas yang jelas, batasan tersebut tidak harus berupa mengenai cakupan geografis, namun juga dapat berupa sebuah konstruksi sosial yang ditentukan oleh anggotanya, sebagai contoh yaitu Turki yang secara geografis merupakan negara Asia namun juga diakui sebagai salah satu anggota dalam Uni Eropa. (Ravenhill, 2011).

Dari pendapat Cohn penulis mengambil definisi regionalisme klasik. Regionalisme jenis ini lebih bersifat *high politic* dengan aspek politik yang mendominasi karena fokus regionalisme pada saat itu adalah aspek pertahanan dan keamanan

wilayah. Regionalisme klasik mengalami kemunduran di tahun 1990an pasca Perang Dingin usai. Salah satu sebabnya adalah karena negara-negara tidak lagi menginginkan kerjasama yang bersifat *high politic*. Masyarakat dunia lebih memilih untuk hidup aman dan damai tanpa adanya ketegangan yang diakibatkan Perang Dingin. Oleh karenanya, sifat kerjasama saat ini terjadi secara regional atau hanya terbatas dalam satu kawasan saja (Cohn, 2011).

Dampak AUKUS di Kawasan

Sebelum mulai membahas apa yang harus dilakukan Indonesia mengantisipasi kehadiran AUKUS, akan lebih baik untuk dipahami bersama bagaimana dampak AUKUS ini sendiri di kawasan Indo-Pasifik. Salah satu dampak yang terasa adalah perlombaan senjata (*armed race*). Perlombaan senjata menjadi salah satu figur penting dalam konsep dilema keamanan (*security dilemma*). Dilema keamanan sangat terkait dengan istilah ancaman, yang bisa terjadi secara global, maupun regional (Jervis, 1985). Menginisiasi terjadinya dilema keamanan dapat dikategorikan sebagai aksi ofensif yang mengancam negara lainnya.

Dalam konteks AUKUS, para pemimpin negara-negara yang tergabung dalam kerjasama pertahanan tersebut menyebutkan bahwa mereka akan mematuhi NPT. Traktat yang pada tahun 1968 ditandatangani juga oleh tiga negara tersebut. Setiap negara penandatangan NPT harus berkomitmen untuk membatasi kepemilikan senjata nuklirnya. Apabila seperti itu, apakah AUKUS hanya akan bersifat defensif? Dasar postulat dari dilema keamanan juga adalah perlindungan diri (pertahanan), yang pastinya bersifat defensif. Namun, jika benar AUKUS menimbulkan dilema keamanan di Indo-Pasifik, maka sudah pasti akan terjadi ketegangan dengan China yang dapat memicu terjadinya perang nuklir. Sebuah situasi yang sangat mempengaruhi perdamaian dunia (Nindya & Abiyaya, 2022).

AUKUS disorot karena berakibat pada peningkatan rivalitas penggunaan senjata nuklir di kawasan Indo-Pasifik. AS ju-

ga termasuk, sekalipun mereka tidak berada di kawasan tersebut, namun mereka menguatkan posisi negeri Kanguru secara regional. Sebaliknya, China meningkatkan manuver-manuver-nya di LCS dan mengancam kepentingan strategis negara-negara di kawasan. Namun, politik luar negeri hegemonik AS membuat mereka memiliki kepentingan yang hegemonik terkait manuver China di perairan sengketa tersebut.

Sebagai negara hegemon, peningkatan pengaruh dari negara rival, dalam hal ini China, di sebuah kawasan, menjadi ancaman tersendiri bagi kepentingan AS, tidak hanya regional, tetapi juga secara global. China berpotensi untuk menjadi negara hegemon, khususnya di bidang ekonomi. Hegemoni secara ekonomi akan membuat militer China semakin kuat (Harahap, 2020). Hegemoni bagi Gramsci adalah proses reproduksi makna dan praktik kelompok dominan kepada kelompok sub-ordinat dengan menghadirkan kepentingan tertentu dari si kelompok dominan (Amanda, 2021). China dengan demikian bertransformasi menjadi negara dominan, dengan negara-negara di Indo-Pasifik sebagai sub-ordinatnya, termasuk ASEAN.

Organisasi terbesar di kawasan tentu adalah ASEAN. Dampak dari hadirnya AUKUS akan dirasakan juga oleh organisasi kerjasama antar-negara Asia Tenggara ini. Kewaspadaan di pihak ASEAN penting, terutama karena Presiden AS Joe Biden dan mantan Perdana Menteri Australia Scott Morrison sempat memberikan pernyataan bahwa kawasan Indo-Pasifik perlu mengalami stabilisasi yang diperlukan. Penulis berpendapat stabilisasi ini berkaitan dengan upaya meredam pengaruh China terhadap ASEAN. Biden dan Morrison menambahkan bahwa AS dan Australia ingin meningkatkan kerjasama dengan sepuluh negara yang tergabung di ASEAN, baik secara bilateral, maupun multilateral. Stabilisasi ini persis dengan teori *Regional Security Complex* yang melihat bahwa diperlukan indikator untuk menentukan situasi internasional di mana diperlukan atau tidaknya pengaturan keamanan di suatu kawasan (Buzan & Waever, 2003).

Hubungan negara-negara ASEAN dengan China tidak selalu baik. Sebagai contoh, Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki perselisihan dengan kapal-kapal China di Laut China Selatan, wilayah yang luas di mana Beijing telah membuat klaim besar atas sumber daya hidrokarbon dan perikanan. ASEAN telah berusaha untuk menyeimbangkan hubungan antara ekonomi terbesar dunia, mengandalkan senjata AS untuk menjaga Beijing dari membangun hegemoni regional bahkan ketika mereka menjadi lebih bergantung pada China untuk pertumbuhan ekonomi. AUKUS berisiko mengubah persamaan itu, meningkatkan kemungkinan konfrontasi AS-China yang dapat berdampak pada konsekuensi ekonomi dan keamanan kawasan (Muhaimin, 2021).

Sengketa LCS berdampak cukup besar terhadap konstelasi politik negara-negara *claimant*, termasuk China dan AS yang berebut pengaruh di Indo-Pasifik. Konflik yang bersifat strategis harus dapat dianalisis, karena cepat atau lambat akan mempengaruhi situasi global, regional, serta situasi nasional Indonesia juga pastinya. Analisis situasi dan dampak konflik LCS harus menjadi sebuah kajian strategis karena potensi masalah LCS dapat berkembang menjadi konflik bersenjata dan mengancam stabilitas kawasan, termasuk Indonesia.

Dampak selanjutnya, AS juga memiliki kepentingan besar di LCS jika melihat potensi geopolitik dan geostrategis yang ditawarkan wilayah tersebut. Paling tidak ada tiga kepentingan AS di LCS dalam skala mikro. Pertama, AS memiliki kepentingan pertahanan, yaitu mempertahankan akses tanpa hambatan ke perairan LCS, serta mempertahankan perdamaian regional dan stabilitas kawasan. Kedua, AS memiliki kepentingan ekonomi, khususnya di jalur perdagangan internasional yang sebagian besar melewati kawasan perairan LCS.

Ketiga, AS memiliki kepentingan tata internasional, yaitu berupaya untuk mempertahankan kekuatan dominasinya di kawasan Asia Pasifik dan juga untuk menuntut negara-negara yang terlibat dalam konflik untuk patuh terhadap hukum

internasional. Sayangnya, hal ini terlihat *reluctant* karena sekalipun pengadilan arbitrase internasional di Den Haag pada tahun 2016 lalu sudah memutuskan bahwa China secara hukum (UNCLOS) tidak sah untuk mengklaim sumber daya yang ada di LCS, namun mereka tidak bersedia mematuhi (Koesmawardhani, 2016).

Selanjutnya, kebijakan strategis AS terhadap China adalah dengan melakukan tekanan ekonomi, politik, sanksi global terhadap negara Xi Jinping itu. Tekanan tersebut termasuk dengan menutup Konsulat China di Houston pada Juli 2020, serta memberikan pernyataan sikap resmi AS melalui Menteri Luar Negeri Mike Pompeo pada bulan yang sama, terkait penolakan klaim China di LCS. AS pun di dalam negerinya mengangkat isu sentimen anti China, ideologi, dan Partai Komunis China (PKC).

Secara militer, AS memperkuat kehadiran armada maritim dan udaranya di kawasan Indo-Pasifik. AS bahkan mengubah nama komandonya, dari Komando Pasifik (*US Pacific Command*) menjadi Komando Indo-Pasifik (*US Indo-Pacific Command*). Dengan demikian, armada laut AS bisa lebih leluasa melaksanakan patroli di sekitar wilayah sengketa, termasuk melakukan latihan militer dengan mengerahkan kapal induk di sana (Berlianto 2018). Pada bulan April 2020, AS mengerahkan kapal-kapal perang jenis *Fregat* dan *Destroyer* dan tiga kapal induk (USS Nimitz, USS Reagen, dan USS Roosevelt). Pada bulan Juli 2020, AS kembali meningkatkan kehadiran militernya dengan pesawat pembom B-1B/B-52H dan pesawat anti-kapal selam P-8 Poseidon. Selain itu, hadir juga pesawat pengintai dan pesawat nirawak (drone) MG-4C sebanyak 67 buah.

Untuk mendukung mobilisasi pasukan, AS membangun pangkalan pertahanan di *Second Chain Island*, seperti di Kepulauan Palau dan Guam untuk menghadapi kemungkinan ancaman rudal-rudal China, serta melindungi *First Island Chain*, seperti Laut China Timur, Selat Taiwan, dan LCS sen-

diri tentunya. Aktivitas militer ini didukung dengan “Senjata Terobosan” yaitu anggaran sebesar 2 miliar US Dollar untuk kemungkinan menghadapi perang di LCS. Tak lupa AS melibatkan kekuatan negara-negara sekutunya, khususnya yang ada di kawasan, seperti Australia, Jepang, dan juga India (CNN Indonesia, 2020).

Di era Joe Biden ini, AS memang mungkin saja menurunkan eskalasi ketegangan di LCS dengan China, apalagi di tengah isu pandemi Covid-19 yang belum selesai. Namun, potensi dari terjadinya perang dalam skala besar bisa saja terjadi mengingat belum ada konsensus terkait bagaimana penyelesaian sengketa di LCS. Politik luar negeri AS bisa saja *shifting* kembali ke LCS ketika melihat langkah China semakin agresif di sektor itu. Analisis ini berangkat dari pemahaman penulis bahwa AUKUS adalah manifestasi dari teori Regional Security Complex yang dapat menjadi faktor dari perubahan politik luar negeri AS.

Itulah mengapa AUKUS menjadi pusat perhatian negara-negara di Indo-Pasifik, terlebih China yang sekarang menjadi rival hegemoni AS di kawasan ini. China memang mendominasi kekuatan militer dan ekonomi di Indo-Pasifik. Penentangan terhadapnya dapat berpengaruh kepada keamanan kawasan. Kondisi ini membuktikan teori *Regional Security Complex*, bahwa sekalipun berada dalam satu kawasan, tidak ada jaminan negara-negara di Indo-Pasifik memiliki hubungan yang konstruktif. Ketegangan tetap terjadi, sehingga memunculkan *balance of power*.

AUKUS sebagai Anti-Tesis Manuver China di Kawasan

Dampak paling masif dari terbentuknya AUKUS dirasakan oleh China, yang membuat mereka naik pitam atas situasi ini. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian menyatakan, aliansi ketiganya berpotensi merusak stabilitas regional dan memulai perlombaan senjata. Zhao mengkritik ketiganya menerapkan "mentalitas Perang Dingin usang", dan memperingatkan mereka bisa merusak kepentingan mereka sen-

diri sendiri, bahkan mengarah ke arah perang dingin jilid II. Mekanisme kerjasama dan hubungan baik di kawasan harus sesuai dengan keinginan bersama untuk meraih perdamaian dan kepercayaan, serta pembangunan yang konstruktif (Ardi, 2021).

Manuver China di kawasan Indo-Pasifik harus diredam dengan gabungan kekuatan negara-negara AUKUS. Mengandalkan Australia saja ditambah beberapa mitra AS, seperti Singapura, Malaysia, dan juga Filipina tentu tidak akan mampu menahan ekspansi China di kawasan dalam berbagai bidang, khususnya ekonomi dan militer. Ditambah lagi Filipina di era Presiden Rodrigo Duterte terkesan lebih netral, bahkan dalam beberapa kasus memihak Beijing. Ferdinand Marcos Jr. yang baru terpilih dalam Pilpres Filipina hingga tulisan ini dibuat belum menunjukkan apakah akan mempertahankan sikap Duterte terhadap China atau beralih kembali kepada sekutu tradisional Manila.

AUKUS dengan demikian hadir sebagai antitesis dari manuver-manuver China di kawasan yang selama ini seperti tidak bisa dihalangi. *Regional Security Complex* memberikan pandangan bahwa kehadiran aktor keamanan dengan kepentingan global sebenarnya secara fundamental bersifat regional. Keterlibatan mereka dalam isu-isu keamanan regional adalah hasil dari daya pikat masalah-masalah yang terjadi di wilayah itu sendiri. China tertarik dengan masalah-masalah regional karena mereka memiliki kepentingan global. Teori *Regional Security Complex* sejalan dengan ambisi China menjadi negara hegemoni menyaingi AS.

Argumen tersebut membuat penulis berpendapat bahwa manuver China di Indo-Pasifik harus dihadapi oleh gabungan kekuatan hegemonistik dunia (*major powers*), yang dimanifestasikan dalam bentuk AUKUS. Argumen ini diperkuat pendapat Buzan dan Weaver tentang *Regional Security Complex* (2003) bahwa keamanan internasional harus dilihat dari perspektif regional dan hubungan antar aktor negara menunjukkan

pola-pola pengelompokan secara geografis. Itulah sebabnya AUKUS dibentuk oleh AS, Inggris, dan Australia sebagai anti-tesis manuver China di Indo-Pasifik, yang notabene adalah halaman depan China sendiri.

Dari sisi yang berbeda, bagi China, Australia sekarang adalah target dari perang nuklir, akibat kesepakatan kapal selam bertenaga nuklirnya dengan AS dan Inggris. AUKUS dari perspektif China adalah pelanggaran berat hukum internasional. Serangan para diplomat-diplomat Beijing terhadap kesepakatan AUKUS pun dilihat sebagai ambisi Presiden Jinping untuk menjadikan China sebagai kekuatan angkatan laut yang dominan di Indo-Pasifik, jika tidak dunia di kemudian hari. Kekuatan China yang mendominasi segala aspek, mulai ekonomi sampai militer di Indo-Pasifik membuat AUKUS menjadi anti-tesis manuver China tersebut. AUKUS dapat menjadi saluran distribusi kekuatan kawasan selain dominasi China.

China bukannya tidak menyadari hal ini. Berdasarkan penelitian Panda dan Niclas, China sadar bahwa AUKUS adalah kode peringatan dari Washington sebagai alat perlawanan terhadap masifnya pengembangan kekuatan militer China di Indo-Pasifik. Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, secara tegas menyatakan AUKUS menghasilkan bahaya meningkatnya kompetisi nuklir kawasan sebagai akibatnya lemahnya rezim yang justru melakukan proliferasi nuklir, di saat seharusnya mereka patuh pada NPT (Panda & Niclas, 2021).

Meningkatnya pengaruh kekuatan militer China berpeluang menghadapi negeri itu dengan AUKUS melalui kompetisi senjata nuklir. Akibatnya, Australia menyadari bahwa China memiliki kemampuan untuk meluncurkan rudal nuklir jarak menengah ke negara mereka. Itu sebabnya AUKUS dibentuk agar Australia dapat mengantisipasi serangan China sekaligus melakukan pembenahan kekuatannya sendiri karena kepemilikan kapal selam dan senjata nuklir jarak jauh dimungkinkan melalui kerjasama AUKUS (Shugart, 2021).

Menurut pendapat penulis, AUKUS sebagai anti-tesis manuver China sudah terbukti karena ditenggarai manuver mereka membahayakan stabilitas keamanan regional. Bahkan, hadirnya AUKUS sendiri dipicu oleh China ini. Kerjasama AUKUS, khususnya tentang kapal selam nuklir, adalah sikap antisipatif Australia jika perang pecah di kawasan. AUKUS sendiri dengan demikian dibentuk sebagai tindakan antisipasi AS dan sekutunya di Indo-pasifik terhadap manuver China yang notabene mengganggu kepentingan mereka.

Di sisi lain, AUKUS adalah sinyal bahaya bagi China karena dianggap sebagai sebuah aksi ofensif yang pastinya berdampak pada dilema keamanan negara itu. AUKUS adalah “wajah” AS di kawasan Indo-Pasifik untuk mengganggu kepentingan China. Kondisi ini memang bisa membawa keseimbangan politik internasional di kawasan, tetapi bisa menimbulkan resiko bagi negara-negara lain yang ada disana. Potensi konflik tetap bisa muncul di tengah keseimbangan yang ada. Untuk itu, penting memahami bagaimana respons Indonesia menghadapi “keseimbangan” ini.

Apa yang Harus Dilakukan Indonesia?

Dilihat dari konteks geopolitik, Indonesia adalah negara kepulauan yang berada di pusat kawasan Indo-Pasifik. Jangan dilupakan juga, Indonesia adalah negara yang sejak kemerdekaannya menyatakan dirinya sebagai sebagai negara non-blok. Sesuai dengan teori regionalisme Ravenhill, pemahaman mengenai regionalisme tidak harus bersifat geografis, akan tetapi bisa juga dalam bentuk konstruksi sosial yang ditentukan oleh negara-negara yang ada di lingkup itu (Ravenhill, 2011). Menurut pemahaman penulis, Indo-Pasifik adalah sebuah bentuk region yang tidak hanya berisikan negara-negara Asia, tetapi juga Australia, bahkan juga AS. AUKUS memberikan warna serupa dengan definisi regionalisme klasik yang lebih bersifat *high politic* (Cohn, 2011). AUKUS dapat merangsang munculnya Perang Dingin jilid II, yang dimulai dari kawasan Indo-Pasifik ini. Di saat kerjasama

regional mulai menghindari kontestasi politik internasional gaya “koboi vs beruang merah”, aliansi AUKUS justru mengangkat romantisme lama itu menjadi kenyataan.

Terbentuknya aliansi AUKUS dengan demikian mengindikasikan sinyal potensi meningkatnya eskalasi politik internasional di Indo-Pasifik, dan memberikan dampak terhadap Indonesia, yaitu rawannya stabilitas kawasan karena wilayah lautnya akan dilewati oleh kapal selam nuklir. Di kawasan ASEAN akan muncul perlombaan senjata sebagai antisipasi manuver mengancam negara lain. Keutuhan ASEAN akan sulit terjaga, terlebih kekuatan militer negara-negara ASEAN tidak sebanding dengan kekuatan militer negara *superpower*.

Kemudian terkait LCS, dinamika politik kawasan akan semakin panas dengan bertambahnya kekuatan militer negara-negara yang sebenarnya tidak mengajukan klaim hak kepemilikan. Apalagi, hadirnya AUKUS salah satunya adalah untuk menghadapi pengaruh China yang besar di kawasan, khususnya terkait isu LCS ini. Secara tidak langsung, hal itu bisa menyebabkan gangguan terhadap lalu lintas pelayaran. Akibatnya, akan terjadi peningkatan risiko sehingga asuransi dan biaya logistik meningkat, yang berpotensi menciptakan krisis energi dan ekonomi. rivalitas di LCS berpotensi bereskalasi menjadi perang karena masing-masing negara ingin mengembangkan kekuatannya.

Indonesia tentu memiliki kepentingan nasional juga terhadap LCS. Kepentingan-kepentingan tersebut, seperti perdamaian dan stabilitas kawasan, kebebasan navigasi, hak berdaulat di ZEE sesuai UNCLOS, kebebasan kerjasama dengan negara mana pun, kepentingan ekonomi, politik, dan strategis, dan tentunya kepentingan menjaga keselamatan rakyat dan tegaknya NKRI. Namun, kepentingan Indonesia ini terancam dengan kondisi LCS sekarang, di mana China dan AS sedang berseteru.

Posisi Indonesia saat ini bukan negara *claimant*, namun langkah China mengklaim LCS saat ini sudah mulai memasuki

wilayah berdaulat ZEEI di perairan Laut Natuna Utara (LNU). Apalagi, China kerap berupaya menghadirkan kapal-kapal ikannya untuk melakukan penangkapan ikan di perairan ZEEI maupun Landas Kontinen Indonesia, dengan pengawasan ketat oleh kapal-kapal *Coast Guard* mereka. Situasi ini mengindikasikan bahwa China bersikukuh untuk menguasai LNU juga, apalagi wilayah itu juga dikenal memiliki nilai strategis. LNU adalah jalur lalu lintas pelayaran internasional dan secara ekonomi memiliki sumber daya alam besar, khususnya migas (Indrawan, 2017).

Langkah China ini tentunya menjadi ancaman bagi kedaulatan NKRI, khususnya bidang ekonomi dan militer. Di bidang ekonomi, kekayaan laut di LNU akan habis terkuras karena ikan di dalam wilayah perairan Indonesia akan habis oleh kegiatan *illegal fishing* yang dilakukan nelayan China, dan bisa juga negara lain, seperti Vietnam dan Thailand. Akibatnya, akses nelayan Indonesia di LNU sampai dengan ZEEI akan terbatas. Selain itu, kegiatan penyelundupan akan meningkat sehingga merugikan industri dalam negeri, belum lagi potensi masuknya barang-barang ilegal, seperti narkoba, bahan peledak, pakaian ilegal, dll (Indrawan, 2017).

Selain itu, meningkatnya tensi di LCS juga berdampak pada pendapatan negara dari ladang gas bumi di ZEE Indonesia pada perairan tersebut. Selama ini, sebagian besar hasilnya dikirimkan melalui pipa bawah laut ke Singapura dan Malaysia. Jika sengketa kerap terjadi, akan muncul peningkatan biaya perkapalan komoditas ekspor Indonesia ke kawasan Asia Timur. Biaya asuransi kapal niaga yang melintasi LCS juga pasti akan naik, sehingga kemungkinan kapal-kapal niaga akan mengubah arah pelayarannya menghindari LCS (Indrawan, 2017).

Itulah sebabnya yang harus Indonesia lakukan adalah mengawasi lebih ketat wilayah lautnya, khususnya LNU yang berbatasan langsung dengan LCS. Penegak hukum Indonesia mesti hadir di laut secara terus menerus, selektif, dan menun-

juukkan intensi langsung atau tidak langsung. Mulai dari TNI Angkatan Laut, Bakamla, hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Ketegasan dalam penegakan hukum ini tidak boleh kompromi. Kalau ada yang melanggar, tetap harus ditindak, baik itu di ZEE maupun landas kontinen. Selain itu, juga harus bisa mengeksplorasi sumber daya alam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Jangan hanya mengklaim di atas peta sedangkan aksinya tidak ada (Indrawan, 2019).

Upaya lainnya yaitu membangun hubungan konstruktif kepada semua negara yang memiliki kepentingan di LCS. Hal ini dapat dilakukan melalui menjalin kerja sama secara selektif, khususnya dengan ASEAN. Kondisi yang bisa tercapai sesuai dengan pendapat Wendt tentang keamanan regional, yaitu keamanan regional dapat dibentuk dengan sengaja melalui interaksi sosial. Lebih lanjut, interaksi ini akan membentuk identitas dan kepentingan bersama (Fariani & Sholeh, 2020).

Sebagai salah satu pendiri, Indonesia dapat tampil sebagai pemimpin tradisional ASEAN. Indonesia harus sesegera mungkin menyerukan sikap kolektif ASEAN sebelum blok ini dipecah oleh negara-negara besar, apalagi sejak AUKUS mulai menancapkan giginya melawan hegemoni regional China di Indo-Pasifik. Indonesia tidak bisa menghadapi sendiri perseteruan antara AUKUS dan China di kawasan Indo-Pasifik. Harus ada sikap kolektif dari seluruh negara ASEAN untuk berkomitmen agar wilayah Asia Tenggara bebas dari senjata nuklir. Perlombaan senjata, apalagi nuklir, bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ASEAN (Kuswardini, 2018).

Jadi, peran ASEAN dalam menangani ancaman AUKUS terletak pada kemampuan organisasi itu sebagai sebuah organisasi regional untuk berusaha memastikan penyelesaian sengketa-sengketa kawasan dilakukan melalui mekanisme diplomasi, kepatuhan terhadap hukum internasional dan menghindari penggunaan kekuatan yang mencerminkan pelaksanaan “*ASEAN Way*”. Indonesia di sisi lain juga harus menghor-

mati langkah-langkah diplomatis yang diusulkan ASEAN terkait upaya-upaya damai di kawasan, akan tetapi tetap mensiagakan kekuatan militer jika konfrontasi fisik tak terelakkan.

Indonesia dan negara-negara ASEAN harus melawan dengan narasi perlawanan mengenai pentingnya stabilitas regional untuk pemulihan ekonomi dari krisis akibat Covid-19. Bukan malah kembali merangsang timbulnya rivalitas klasik ala Blok Barat vs Blok Timur. Hal lain yang perlu dilakukan Indonesia yakni terus mengkampanyekan upaya hukum internasional, yaitu meratifikasi NPT. Semakin banyak negara yang melakukannya, sebagai upaya hukum internasional, kita dapat mengkriminalisasi senjata nuklir secara internasional. Dengan demikian memberikan tekanan politik kepada AUKUS dan China sehingga manuver keduanya di Indo-Pasifik tidak sampai berakibat fatal terhadap situasi keamanan regional.

Rivalitas antar-kubu ini akan diperparah dengan keterlibatan AS melalui AUKUS, sehingga potensi terjadinya konflik bersenjata cukup besar. Apalagi klaim China di LCS memang sangat memungkinkan untuk terjadinya konflik bersenjata. Dari sisi Indonesia, kemungkinan China memprovokasi Indonesia, termasuk melakukan aksi koersif terhadap kapal-kapal China yang mencari ikan misalnya, sangat mungkin membuat Indonesia mengerahkan kekuatan militer ke LCS atau LNU. Sebuah skenario yang didasarkan oleh teori *Regional Security Complex* yang diakibatkan munculnya rivalitas regionalisme klasik yang bersifat *high politic*.

Terakhir, Indonesia akan dipengaruhi oleh dua kekuatan militer AS dan China sehingga akan membatasi kebebasan dalam pembelian alutsista, bahkan tertarik ke dalam kancah perang. Ditambah Australia, yang berkat AUKUS, akan mempunyai kapal selam nuklir. Indonesia dan negara-negara ASEAN harus mengedepankan kerjasama dan perdamaian, bukan malah kembali merangsang timbulnya rivalitas klasik

ala Blok Barat vs Blok Timur yang berakar dari teori Regional Security Complex dan regionalisme klasik.

Langkah-Langkah Antisipasi Strategis

Indonesia adalah negara besar yang harus memiliki langkah-langkah strategis untuk menjaga kedaulatannya menghadapi ancaman AUKUS, termasuk melawan manuver China, Indonesia harus tetap berada dalam posisi netral. Indonesia harus mampu memanfaatkan keuntungan strategis dengan melakukan pendekatan untuk merangkul AS, Inggris, Australia, dan juga Uni Eropa terkait isu LCS. Indonesia juga harus tetap menjalin hubungan baik dengan AS, termasuk melanjutkan kerjasama militer yang sudah terjalin selama ini tanpa terikat dengan kepentingan AS di LCS. Terakhir, Indonesia dan AS melaksanakan latihan bersama di Kepulauan Natuna dan LNU sesuai program TNI.

Langkah-langkah strategis juga perlu dilakukan TNI, seperti membangun satuan terintegrasi. Sekalipun masih segera dibentuk, namun satuan ini akan terdiri dari satuan-satuan TNI AD, yakni Batalyon Komposit, yang diperkuat oleh Kompi Zeni Tempur, Baterai Rudal Artileri Pertahanan Udara, dan Baterai Artileri Medan. TNI juga harus melengkapi satuan-satuan dengan personil dan alutsista yang dibutuhkan, termasuk penguatan TNI di pulau-pulau terluar, peningkatan status Kodim menjadi Tipe A, dan membangun pangkalan kapal selam di Natuna untuk TNI AL, khususnya untuk menghadapi ancaman kapal selam nuklir Australia. Kemudian, perlu juga dilakukan sinergi intelijen TNI AD, AU, AL agar responsif dan antisipatif terhadap kegiatan pelanggaran wilayah maupun intelijen yang dilakukan lawan agar deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya perang terbuka, bahkan perang nuklir.

Saat ini, TNI sudah melakukan gelar kekuatan Satuan TNI Terintegrasi (STT) di Natuna. STT sebagai unsur pelaksana Kogabwilhan yang beroperasi secara Tri Matra Terpadu dan berkedudukan di bawah Pangkogabwilhan. TNI *Deployment* di

Natuna saat ini sudah ada di Tanjung Datuk, Desa Setengar, Desa Sepampang, Selat Lampa, dan Lanud Ranai. Radar permukaan, Long Range Camera, Radar Udara, dan 1 Rai Armed MLRS ditempatkan di Tanjung Datuk. Kisit Marinir, Gudbek & Gud Munisi Integratif, dan 1 Kizipur ada di Desa Setengar. Di Desa Sepampang terdapat Mako Yon Komposit. Dermaga kapal atas air, ponton kapal selam, dermaga *beaching*, dan fasilitas pangkalan diposisikan di Selat Lampa. Terakhir, di Lanud Ranai terdapat Mess Prajurit Integratif, Rumkit Integratif, Hangar Pesawat dan Helikopter Integratif, Sisdalops TNI Terpadu, Hangar Skad UAV, Perpanjangan Runway, Pembangunan Taxiway, dan 1 Rai Arhanud Rudal.

Selain AUKUS, Indonesia juga secara diplomatik harus mengatasi persoalan di LCS karena dampak ikutan (*spill-over effect*) dari terbentuknya AUKUS. Indonesia harus menolak klaim penguasaan China terhadap LCS berdasarkan *Nine Dash Line* dan prinsip *Traditional Fishing Ground*. Kedua, Indonesia mendukung hasil pengadilan arbitrase internasional pada 12 Juli 2016. Ketiga, TNI harus mengintensifkan patroli dan penjagaan di kawasan LNU. Keempat, kegiatan ekonomi pada wilayah perairan LNU atau kawasan ZEE Indonesia harus ditingkatkan. Kelima, Indonesia harus memperkuat kapasitas dalam penegakan hukum di ZEE, khususnya di Kepulauan Natuna.

Penutup

Hadirnya AUKUS menimbulkan dilema keamanan di Indo-Pasifik yang akan menyebabkan ketegangan dengan China dan negara-negara lainnya di kawasan. Sekalipun demikian, AUKUS juga muncul sebagai anti-tesis dari manuver China di kawasan tersebut. Contohnya, China meningkatkan manuvernya di LCS dan mengancam kepentingan strategis negara-negara di kawasan. Dari sisi AUKUS, khususnya AS, politik luar negeri hegemonistik mereka membuat negara itu memiliki kepentingan yang esensial terkait manuver China di Indo-pasifik. Sebagai negara hegemon, meningkatnya kekuatan

China di Indo-Pasifik menjadi ancaman tersendiri bagi kepentingan global AS.

AUKUS menjadi pusat perhatian di Indo-Pasifik, apalagi ditenggarai munculnya adalah akibat manuver-manuver China di kawasan. Kekuatan militer dan ekonomi China mendominasi kawasan Indo-Pasifik, sehingga penentangan terhadapnya dapat berpengaruh kepada keamanan kawasan. Kondisi ini membuktikan teori Regional Security Complex, bahwa sekalipun berada dalam satu kawasan, tidak ada jaminan negara-negara di Indo-Pasifik memiliki hubungan yang konstruktif.

Menanggapi hal tersebut, Indonesia sebaiknya melakukan beberapa kebijakan strategis sebagai langkah antisipatif, seperti mengawasi lebih ketat wilayah lautnya, memastikan penegak hukum Indonesia hadir di wilayah laut kita secara terus menerus, membina hubungan diplomatik yang baik dengan ASEAN, China, dan tentunya negara-negara yang tergabung dalam AUKUS. Beberapa hal ini dapat dilakukan untuk menangkal ancaman AUKUS, maupun manuver China di kawasan.

Daftar Rujukan

- Buzan, Barry dan Ole Waever, 2003. *Regions and Powers The Structure of International Security*. New York: Cambridge University Press
- Cohn, Theodore, 2011. *Regionalism and the Global Trade Regime*. London: Routledge
- Indrawan, Jerry, 2019. *Pengantar Studi Keamanan*. Malang: Intrans Publishing
- Nawawi, Hadari. 1997. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Panda, Jagannath dan Swanstorm Niklas, 2021. *AUKUS: Resetting European Thinking on the Indo-Pacific?* Stockholm: Institute of Security & Development Policy.
- Ravenhill, John, 2011. *Global Political Economy*. Oxford: Oxford University Express.

Sukmadinata, 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Artikel Jurnal

- Fariani, Mufidah dan Badrus Sholeh, 2020. "China's Military Increase: A Security Dilemma In Asia Pacific", *Jurnal Mandala*, 3(2): 120-33 <http://dx.doi.org/10.33822/mjihi.v3i2.2151>
- Harahap, Fathin Nisa Muthia, 2020. "Analisis Potensial Tiongkok untuk Menjadi Negara Hegemon di Kawasan Asia Timur Melalui Strategi One Belt One Road", *Journal of International Relations*, 6(2): 164-72 <https://doi.org/10.14710/jirud.v6i2.26540>
- Indrawan, Jerry, 2017. "Peningkatan Status Lanal Ranai Menjadi Lantamal: Strategi Indonesia Sebagai Antisipasi Ancaman China di Natuna", *Jurnal Mandala*, 1(1): 124-43 <http://dx.doi.org/10.33822/mjihi.v1i1.293>
- Jervis, Robert, 1985. "From Balance to Concert: A Study of International Security Cooperation", *World Politics*, 38(1): 58-79 <https://doi.org/10.2307/2010351>
- Kuswardini, Seftina, 2018. "Asean Dalam Mendorong Negara Permanent 5 Untuk Mengaksesi Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone (Seanwzf)", *Islamic World and Politics Journal*, 2(1): 267-81 <https://doi.org/10.18196/jiwp.2116>
- Nindya, Annisa Putri dan Rifqy Alief Abiyya, 2022. "Pengaruh AUKUS terhadap Stabilitas Indo-Pasifik dan Sikap Indonesia", *Jurnal Politica*, 13(1): 67-84 <https://doi.org/10.22212/jp.v13i1.2917>
- Rissa, Amanda, 2021. "Hegemoni Dibalik Hubungan Bilateral Tiongkok-Indonesia", *Jurnal Pamator*, 14(1): 34-39 <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i1.9004>
- Berlianto, 2018. "AS Ubah Nama Komando Pasifik di Tengah Ketegangan dengan China" [Daring] Tersedia dalam <https://international.sindonews.com/berita/1310346/42/as-ubah-nama-komando-pasifik-di-tengah-ketegangan-dengan-china> [Diakses (22 Agustus 2022)].
- CNN Indonesia, 2020. "Lawan Pengaruh China, Palau Desak AS Bangun Pangkalan Militer" [Daring] Tersedia dalam <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200904133747-113-542793/lawan-pengaruh-china-palau-desak-as-bangun-pangkalan-militer> [Diakses (22 Agustus 2022)].

- Koesmawardhani, Nograhan Widhi, 2016. “Ini Putusan Lengkap Mahkamah Arbitrase soal Laut China Selatan” [Daring] Tersedia dalam <https://news.detik.com/international/d-3251971/ini-putusan-lengkap-mahkamah-arbitrase-soal-laut-china-selatan> [Diakses (22 Agustus 2022)].
- Muhaimin, 2021. “China atau Aliansi AUKUS? Pakar: Indonesia Harus Pertimbangkan Ancaman Lebih Besar” [Daring] Tersedia dalam <https://international.sindonews.com/read/546602/40/china-atau-aliansi-aukus-pakar-indonesia-harus-pertimbangkan-ancaman-lebih-besar-1632200977/> [Diakses (22 Agustus 2022)].
- Muhaimin, 2021. “Pakar Top China: Australia Tak Berotak Sekarang Jadi Target Perang Nuklir” [Daring] Tersedia dalam <https://international.sindonews.com/read/546480/40/pakar-top-china-australia-tak-berotak-sekarang-jadi-target-perang-nuklir-1632193793?showpage=all> [Diakses (13 Agustus 2022)].
- Puspaningrum, Bernadette, 2021. “Akademisi Terkemuka China: Australia Akan Jadi Target Perang Nuklir” [Daring] Tersedia dalam <https://www.kompas.com/global/read/2021/09/21/221912970/akademisi-terkemuka-china-australia-akan-jadi-target-perang-nuklir?page=all> [Diakses (15 Agustus 2022)].
- Shugart, Thomas, 2021. “Australia and the Growing Reach of China’s Military” [Daring] Tersedia dalam <https://www-lowyinstitute.org/publications/australia-and-growing-reach-china-s-military> [Diakses (26 Agustus 2022)].
- Utomo, Ardi, 2021. “AS dan Inggris Bantu Australia Buat Kapal Selam Nuklir, China Kecewa” [Daring] Tersedia dalam <https://www.kompas.com/global/read/2021/09/17/122124770/as-dan-inggris-bantu-australia-buat-kapal-selam-nuklir-china-kecewa?page=all> [Diakses (26 Agustus 2022)].